

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BENCANA  
KEBAKARAN PADA WILAYAH PADAT PENDUDUK DI  
KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Farhan Hammam Dermawan  
NPP. 32.0438

*Asdaf Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah*  
*Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*  
Email: farhanhammam11@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Rusmini, M.MPd

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** A significant increase in fire cases from year to year, especially in densely populated areas in Magelang City, Central Java Province. This situation highlights the urgent need to review the effectiveness of existing disaster management models. Fire disaster management cannot be resolved in a sectoral manner and requires a cross-sectoral collaborative approach. However, the implementation of collaboration among actors still faces various obstacles, which represents a gap in the practice of collaborative governance. **Objective:** This study aims to describe the implementation of collaborative governance in fire disaster management in densely populated areas of Magelang City, as well as to identify the inhibiting factors and the government's efforts to overcome these challenges. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method with a field study approach. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation. The study is based on the collaborative governance model by Ansell and Gash (2007), which consists of five components: face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. **Findings:** The study found that forms of collaboration have been established through regular coordination meetings, disaster preparedness drills, and inter-actor communication. Trust is fostered through transparency and intensive communication. Mutual interdependence and shared commitment among actors were evident. A shared understanding is reflected in the clarity of goals and consensus in decision-making, while the intermediate outcomes of collaboration include reduced damage and losses from fire incidents. The main challenges encountered include lack of coordination, limited budget, and low public participation. **Conclusion:** The implementation of collaborative governance in fire disaster management in Magelang City has been initiated but is not yet optimal. Improvements in coordination, regular training, budget allocation, and supporting infrastructure are needed to enhance effective multi-actor collaboration.

**Keywords:** Collaborative Governance, Fire Disaster, Management

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peningkatan signifikan kasus kebakaran dari tahun ke tahun, khususnya di kawasan padat penduduk di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana kebakaran di wilayah padat penduduk di Kota Magelang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori utama yang digunakan adalah model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2007) yang mencakup lima komponen: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, dan dampak sementara. **Hasil/Temuan:** Penelitian menemukan bahwa bentuk kolaborasi telah terbangun melalui rapat koordinasi rutin, apel siaga, dan komunikasi lintas aktor. Kepercayaan dibangun melalui keterbukaan dan komunikasi intensif. Terdapat saling ketergantungan dan komitmen bersama antar aktor yang terlibat. Pemahaman bersama tercermin dari kesepakatan dalam setiap keputusan, sementara dampak sementara kolaborasi terlihat dari berkurangnya kerugian akibat kebakaran. Adapun hambatan utama meliputi kurangnya koordinasi, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat. **Kesimpulan:** Pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kota Magelang telah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan peningkatan koordinasi, pelatihan rutin, dan dukungan anggaran serta sarana prasarana untuk mendukung efektivitas kolaborasi lintas aktor.

**Kata Kunci :** *Collaborative Governance*, Penanggulangan, Bencana Kebakaran

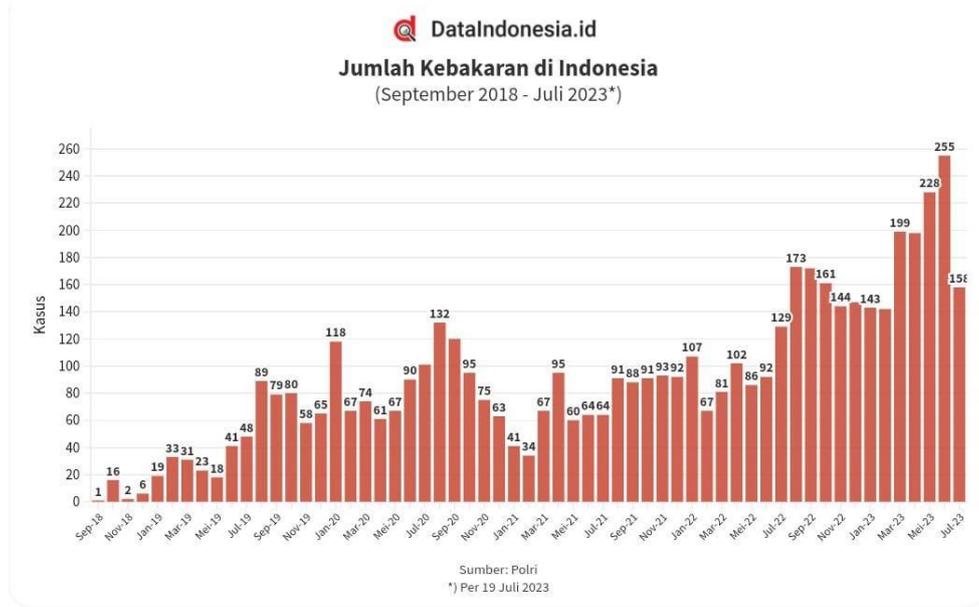
## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sekitar 275 juta jiwa (Putri, D. A. P., 2024). Indonesia menempati urutan keempat terbanyak di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat (Izzah, U., 2024). Pulau Jawa menjadi wilayah terpadat, dengan kepadatan mencapai 8000 jiwa/km<sup>2</sup> di beberapa kota seperti Magelang. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana non-alam seperti kebakaran pemukiman. Sepanjang tahun 2023, tercatat 66 kasus kebakaran di Kota Magelang. Dampak kebakaran meliputi kerusakan pemukiman, kabut asap yang mencemari udara, penurunan jarak pandang, serta korban jiwa dan gangguan psikologis. Kebakaran menjadi ancaman serius yang memerlukan penanggulangan terpadu antar sektor secara efektif dan berkelanjutan (Yudhatama, V. C., 2024).

Kebakaran tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan (Miller, B. A., 2022). Dampak kesehatan yang akan ditimbulkan dari kebakaran antara lain dehidrasi, meningkatnya denyut jantung, iritasi pada mata, dan luka bakar (Damayanti, A. A., 2024). Oleh karena itu ancaman tersebut harus dicegah serta ditanggulangi bersama secara lebih efektif dan efisien. Melihat trennya, kasus kebakaran yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat.

**Gambar 1. Jumlah Kebakaran di Indonesia**



Sumber: <https://dataindonesia.id/>, 2023

Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tercatat 5.336 kasus kebakaran terjadi di Indonesia sejak Mei 2018 hingga Juli 2023. Sebanyak 1.323 kasus atau 24,79% di antaranya terjadi sepanjang tahun 2023 hingga 19 Juli. Jumlah tertinggi tercatat pada Juni 2023 dengan 133 kasus. Pada tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran terbanyak, yaitu 612 kasus. Berdasarkan lokasi, kebakaran paling banyak terjadi di pemukiman atau perumahan sebanyak 926 kasus, disusul pertokoan 91 kasus, dan perkantoran 43 kasus (Jovi, J. P., 2024). Kota Magelang menjadi salah satu kota terdampak di Jawa Tengah. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Magelang mencapai 121.526 jiwa dengan luas wilayah 18,12 km<sup>2</sup> dan tingkat kepadatan mencapai 8.000 jiwa/km<sup>2</sup>. Data ini menjadikan Magelang sebagai kota terpadat kedua di Jawa Tengah setelah Kota Solo, dan menunjukkan bahwa kota ini sangat rentan terhadap bencana kebakaran yang terus meningkat setiap tahun (Wu, J., 2024).

Wilayah Kota Magelang secara umum merupakan bangunan dan infrastruktur yang sangat padat. Kota Magelang dengan kepadatan penduduk yang tinggi, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keselamatan warganya, terutama dalam hal penanggulangan kebakaran (Wismaningtyas, T. A., 2022). Kebakaran dapat terjadi karena berbagai faktor-faktor seperti penggunaan bahan mudah terbakar, instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar, serta ketidakpedulian dan kelalaian masyarakat terhadap protokol keselamatan. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dalam pencegahan kebakaran (Arifina, A. S., 2024). Berikut data jumlah peristiwa kebakaran yang terjadi selama tahun 2021-2023 di Kota Magelang

**Tabel 2. Jumlah Bencana Kebakaran dan Obyek yang Terbakar di Kota Magelang**

No	Tahun	Banyaknya Bencana Kebakaran	Banyaknya yang terbakar		Banyaknya korban		Taksiran Kerugian
			Rumah	Lainya	Meninggal	Luka-luka	
1.	2021	33	21	12	0	2	4.427.500.000,00
2.	2022	34	22	12	0	1	106.500.000,00
3.	2023	66	5	61	0	0	247.000.000,00

Sumber: <http://datago.magelangkota.go.id/>, 2024

Peristiwa kebakaran di Kota Magelang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mendorong perlunya penelitian mengenai penanggulangan bencana kebakaran melalui kolaborasi antar pihak. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengurangan risiko bencana, termasuk pemenuhan hak warga dan alokasi anggaran. Sebagai implementasi, dibentuk BPBD dan diperkuat dengan Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2023. Penanggulangan kebakaran tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan UPT Damkar, masyarakat, dan stakeholder lain guna mengatasi keterbatasan sumber daya di wilayah padat penduduk.

Lemahnya koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait menjadi kendala utama dalam penanggulangan bencana di Indonesia (Agustina, 2017). Ansell dan Gash (2007) menyatakan bahwa *collaborative governance* melibatkan lembaga publik dan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan bersama secara formal dan musyawarah (Ansell, C, Gash, A., 2007). Penanggulangan bencana tidak hanya mencakup pencegahan, tetapi juga kebijakan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana (Miller, B.A., 2022). Berdasarkan kondisi di lapangan, penting meneliti bentuk kolaborasi antara UPT Pemadam Kebakaran dan BPBD dalam penanggulangan kebakaran di wilayah padat penduduk Kota Magelang, guna menciptakan penanganan bencana yang lebih efektif dan menyeluruh.

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penanggulangan bencana lebih banyak berfokus pada aspek mitigasi teknis, peran satu institusi, atau pendekatan top-down pemerintah dalam menghadapi bencana. Sebagian besar belum secara spesifik mengkaji bagaimana model *collaborative governance* diterapkan secara nyata dalam penanggulangan bencana kebakaran, khususnya di wilayah padat penduduk dengan kompleksitas sosial dan infrastruktur seperti di Kota Magelang. Selain itu, kajian yang secara mendalam menganalisis kolaborasi antara BPBD, UPT Damkar, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi masih sangat terbatas. Padahal, dalam konteks bencana kebakaran di wilayah padat, koordinasi dan kolaborasi multi-aktor menjadi kunci keberhasilan. Inilah yang menjadi kesenjangan (gap) penelitian yang ingin dijawab, yaitu bagaimana bentuk implementasi *collaborative governance* dalam penanggulangan kebakaran di Kota Magelang serta faktor-faktor yang menghambat dan mendorong keberhasilannya.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian Alyaa Larasati Hasnaa dan Awang Darumurti (Hasna & Darumurti, 2023) dalam penelitian berjudul *Collaborative Governance dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota Pekalongan* menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk collaborative governance antara Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation diwujudkan dalam beberapa program, seperti kajian dan riset, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana serta MCK Adaptif di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara. Program-program tersebut berhasil mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh banjir rob, memberikan dampak positif dalam mitigasi bencana di wilayah tersebut (Hasna, A. L., 2023).

Rita Wati, Adiando, Sujianto, Meyzi Heriyanto, dan Sigit Sutikno (2024) dalam penelitian berjudul *Peran Collaborative Governance Regime (CGR) dalam Mitigasi Abrasi di Pesisir Kabupaten Bengkalis* menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa CGR memainkan peran krusial dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait abrasi serta meningkatkan partisipasi mereka dalam kebijakan mitigasi. Temuan ini menegaskan pentingnya peran kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi masalah abrasi di pesisir Kabupaten Bengkalis, guna mencapai hasil yang lebih efektif dalam mitigasi dan perlindungan lingkungan pesisir (Wati, R., 2024).

Penelitian Raden Imam Al Hafis, Data Wardana, Sulis Setiawan, dan Adrian Ilham (2024) dalam penelitian berjudul *Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi* menggunakan metode kualitatif. Simpulan penelitian ini menekankan perlunya keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat terdampak, sektor swasta, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah, untuk mengurangi dampak abrasi. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam mitigasi dampak abrasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan (Al Hafis, R. I., 2024).

Heru Rochmansjah (2022) dalam penelitian berjudul *Collaborative Governance Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bandung* menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi collaborative governance dalam penanggulangan banjir di Kota Bandung belum berjalan secara efektif, terutama pada dimensi *collaboration dynamic*. Hal ini terlihat dari dominannya peran pemerintah dalam perencanaan, perumusan, dan penetapan program kegiatan, yang mengurangi kontribusi aktif dari pihak-pihak lain dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program mitigasi bencana banjir (Rochmansjah, H., 2022).

Penelitian Turnip, Henokh Anjulus (2021) dalam tesis berjudul *Collaborative Governance Menangani Masalah Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau* mengkaji proses kolaborasi yang terjadi dalam tim tugas Dalkarhutla di Provinsi Riau dengan menggunakan teori *collaborative governance regime* yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Baloqh. Penelitian ini mengidentifikasi tiga indikator evaluasi, yaitu ruang lingkup, dinamika aksi kolaboratif, dan dinamika kolaborasi. Metode kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polda Riau, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses pembagian sumber daya telah berjalan dengan baik, masih ada instansi yang belum memahami prinsip bersama dalam kerja kolaboratif, serta adanya indikasi intimidasi dari pihak tertentu selama proses pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama dalam tim Dalkarhutla sudah cukup siap diterapkan, namun penting bagi setiap instansi untuk memahami prinsip bersama dalam kolaborasi dan melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat secara masif (Turnip, H. A., 2021).

#### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menonjolkan kebaruan ilmiah dengan mengangkat tema yang belum banyak diteliti sebelumnya, yaitu *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2007) dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kota Magelang, khususnya di wilayah padat penduduk. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada mitigasi bencana banjir dan abrasi, penelitian ini secara spesifik mengeksplorasi kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar, masyarakat dan sektor swasta dalam konteks kebakaran. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang unik, seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat, serta upaya-upaya konkret yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mendalam, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman baru tentang dinamika kolaborasi dalam penanggulangan bencana kebakaran, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran di daerah padat penduduk, menjadikannya berbeda dan lebih relevan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya.

#### 1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penanggulangan bencana kebakaran di wilayah padat penduduk di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan Collaborative Governance serta mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat tersebut guna meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran di daerah tersebut.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali dan memahami fenomena collaborative governance dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kota Magelang (McNaught, R., 2024). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pengalaman dan perspektif para aktor yang terlibat, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar, masyarakat, dan sektor swasta. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pejabat pemerintah dan perwakilan masyarakat, serta melalui observasi langsung terhadap kegiatan kolaborasi yang dilakukan. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari dokumen resmi dan laporan yang relevan untuk mendukung analisis (Martomo, Y.P, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh (Sugiyono, 2014).. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana kebakaran. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Magelang, dengan jadwal yang disesuaikan dengan ketersediaan informan dan kalender akademik. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang kolaborasi dalam penanggulangan bencana, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran di daerah padat penduduk ((Sugiyono, 2014)., 2024).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pemerintah di masa kini dan akan datang. *Collaborative governance* merupakan hasil pengembangan atau bentuk operasional dari konsep *good governance* yang menjelaskan bagaimana jalannya proses keterlibatan stakeholder dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kolaborasi diarahkan pada pencapaian tujuan yang diinginkan bersama oleh setiap individu, kelompok dan organisasi berupa sesuatu hasil yang mempunyai makna dan berkesinambungan (Sartika, I., 2024)

Penulis menganalisis *Collaborative Governance* dalam penanggulangan bencana kebakaran di wilayah padat penduduk Kota Magelang dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash (2007) yang menyatakan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*) (Yahya, A. S., 2024). Adapun pembahasan mengenai kelima faktor tersebut disajikan secara rinci pada subbab berikut.

#### 3.1 Kolaborasi BPBD dan UPT Damkar dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Wilayah Padat Penduduk di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah

##### 1. Dialog Tatap Muka dalam Proses Kolaborasi

Dialog tatap muka memegang peran penting dalam membangun kolaborasi antara BPBD Kota Magelang, UPT Damkar, dan berbagai pihak seperti masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta media massa dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran di wilayah padat penduduk. Melalui rapat koordinasi tahunan, apel siaga, serta latihan bersama, para pihak dapat menyamakan persepsi dan menyusun langkah-langkah strategis secara bersama. Hasil wawancara dengan Bapak Putut Handoko, S.STP selaku Sekretaris BPBD Kota Magelang mengungkapkan bahwa koordinasi telah berjalan dengan baik, meskipun dilakukan 1–2 kali setahun karena keterbatasan anggaran. Selain itu, relawan kebakaran yang bersifat sukarela turut dilibatkan dalam kegiatan bersih-bersih pasca kebakaran dan pemadaman skala kecil, didukung dengan alat pemadam api ringan (APAR) di tiap RT sebagai langkah antisipasi.

Rasa saling menghargai antar pihak menjadi elemen pendukung utama dalam menjaga kelangsungan kolaborasi. Setiap aktor memiliki tugas dan fungsi yang jelas: akademisi menyusun dokumen kebencanaan seperti kajian risiko dan rencana kontijensi; media berperan dalam sosialisasi; dan masyarakat terlibat sebagai relawan. Pembagian peran yang tegas dan kehadiran aktif dalam forum-forum koordinasi mencerminkan sikap profesional dan penghargaan terhadap kontribusi masing-masing pihak. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa tidak terjadi tumpang tindih tugas, menandakan bahwa kolaborasi dijalankan secara efektif dengan prinsip saling menghormati dan saling mendukung dalam rangka mewujudkan penanggulangan kebakaran yang responsif dan terpadu.

##### 2. Membangun Kepercayaan dalam Proses Kolaborasi

Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi merupakan fondasi penting dalam keberhasilan penanggulangan bencana kebakaran. Kepercayaan yang tinggi antar pihak memungkinkan terjalannya kerja sama yang solid dan mengurangi potensi konflik atau kesalahpahaman. BPBD Kota Magelang membangun kepercayaan melalui sikap keterbukaan terhadap berbagai pihak, termasuk UPT Damkar, masyarakat, dunia usaha, dan media. Keterbukaan tersebut mencakup pengakuan terhadap kendala, seperti keterbatasan personel saat kejadian pohon tumbang di berbagai titik, yang kemudian diatasi melalui bantuan relawan masyarakat. Ketersediaan masing-masing pihak untuk menyampaikan permasalahan secara langsung dalam forum dialog, seperti diungkapkan oleh relawan masyarakat, menunjukkan adanya kepercayaan dan komitmen bersama untuk saling membantu dalam proses penanggulangan kebakaran di wilayah padat penduduk.

Selain keterbukaan, komunikasi yang intensif juga menjadi pilar dalam membangun kepercayaan. Dialog tatap muka yang dilakukan secara berkelanjutan baik dalam bentuk rapat koordinasi, apel siaga, maupun sosialisasi menjadi ruang penting untuk menyampaikan informasi, memperkuat hubungan, serta memastikan peran dan tugas setiap aktor berjalan selaras. BPBD melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Diskominfo dalam menyampaikan informasi kebencanaan secara real time kepada masyarakat. Sementara itu, UPT Damkar juga aktif melakukan sosialisasi penggunaan APAR kepada warga. Intensitas komunikasi ini memungkinkan terbentuknya relasi kerja yang responsif, menghindari tumpang tindih pelaksanaan, serta memperkuat rasa saling percaya antar pihak dalam menghadapi bencana secara kolektif.

### **3. Komitmen Bersama Pada Proses Kolaborasi**

Komitmen bersama dalam proses kolaborasi sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, terutama dalam penanggulangan bencana kebakaran di wilayah padat penduduk Kota Magelang. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak seperti BPBD, UPT Damkar, masyarakat, dunia usaha, dan media massa, yang saling bergantung satu sama lain, baik dari segi sarana dan prasarana maupun jumlah personil. Misalnya, BPBD memiliki sarana penunjang, namun UPT Damkar yang mengelola sarana utama untuk pemadaman kebakaran. Kedua pihak, meskipun berbeda tanggung jawab, tetap bekerja sama dalam penanggulangan kebakaran. Komitmen yang dibangun sejak awal harus dijalankan dengan baik oleh semua pihak agar proses penanggulangan bencana dapat berlangsung secara efektif dan efisien, meminimalkan kerugian yang lebih besar.

### **4. Pemahaman Bersama**

Pemahaman bersama dalam kolaborasi penanggulangan bencana kebakaran di Kota Magelang sangat penting untuk mencapai tujuan yang jelas, yaitu meminimalkan korban dan kerugian akibat kebakaran di wilayah padat penduduk. Semua pihak yang terlibat, seperti BPBD, UPT Damkar, masyarakat, dunia usaha, dan media massa, memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Misalnya, masyarakat di Kota Magelang telah sepakat untuk berpartisipasi aktif melalui pembentukan relawan-relawan bencana kebakaran.

Selain pemahaman yang sama, adanya kesepakatan antar pihak juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan kolaborasi. Kesepakatan ini tercipta melalui musyawarah dan koordinasi antara pihak yang terlibat, yang menghasilkan pembentukan tim tanggap darurat kebakaran yang melibatkan berbagai pihak seperti BPBD, UPT Damkar, TNI, Polri, dan relawan. Dengan adanya tim tanggap darurat yang memiliki struktur organisasi yang jelas, kolaborasi ini dapat meningkatkan kapasitas dalam menanggulangi bencana kebakaran, baik pada tahap pra, tanggap darurat, maupun pasca bencana.

### **5. Dampak sementara dari proses kolaborasi**

Dampak sementara dari kolaborasi penanggulangan bencana kebakaran di Kota Magelang menunjukkan hasil yang positif, meskipun belum maksimal, terutama dalam aspek pencegahan kebakaran. Kolaborasi ini memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan di masa depan. Respon cepat dari tim pemadam kebakaran, evakuasi yang lebih terorganisir, serta penyaluran bantuan darurat yang lebih efektif menjadi beberapa hasil positif dari kolaborasi ini. Meskipun demikian, peningkatan jumlah kebakaran setiap tahunnya menunjukkan bahwa langkah pencegahan perlu diperbaiki.

Selain itu, kolaborasi ini juga menyoroti pentingnya tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Setiap pihak, seperti BPBD, UPT Damkar, dan masyarakat, memiliki peran dan tugas yang jelas dalam penanggulangan kebakaran, yang membantu menciptakan kolaborasi yang lebih selaras dan efektif. Keterbukaan komunikasi antara pihak-pihak tersebut juga menjadi faktor penting untuk menghindari kesalahpahaman. Hasil sementara dari

kolaborasi ini memperlihatkan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan kebakaran, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam langkah pencegahan.

### **3.2 Hambatan yang dialami dari *Collaborative Governance* dalam penanggulangan bencana kebakaran pada wilayah padat penduduk di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah**

Dalam implementasi *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana kebakaran pada wilayah padat penduduk di Kota Magelang, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh masing-masing pihak yang terlibat kolaborasi. Seperti yang terjadi pada kolaborasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Magelang dan UPT Damkar selaku perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa.

#### **1. Kurangnya koordinasi antar pihak**

Salah satu kendala utama dalam kolaborasi penanggulangan bencana kebakaran di Kota Magelang adalah kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Putut Handoko S.STP, Sekretaris BPBD Kota Magelang, meskipun koordinasi antar pihak sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang tersedia untuk rapat koordinasi, yang hanya bisa dilakukan 1-2 kali dalam setahun. Padahal, rapat koordinasi sangat penting untuk menyamakan pandangan, mengevaluasi kejadian bencana yang terjadi, serta meminimalisir kesalahan di masa depan.

Keterbatasan dalam pelaksanaan rapat koordinasi ini berdampak pada kesiapan yang kurang matang dalam penanggulangan bencana. Selain itu, kesulitan dalam menyelaraskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak juga menjadi faktor penghambat kolaborasi yang efektif. Dengan demikian, meskipun kolaborasi antara BPBD, UPT Damkar, masyarakat, dan media massa telah berjalan, koordinasi yang lebih intensif dan terjadwal dengan baik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana kebakaran di Kota Magelang.

#### **2. Keterbatasan anggaran**

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala signifikan dalam penanggulangan bencana kebakaran di wilayah padat penduduk Kota Magelang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Didik, Kepala UPT Damkar Kota Magelang, keterbatasan dana menyebabkan alat penunjang pemadaman yang dimiliki masih terbatas dan tergolong kuno. Akibatnya, biaya pemeliharaan peralatan pemadaman menjadi sangat besar. Keterbatasan dana ini juga berdampak pada pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemadaman, seperti kurangnya alat pemadam kebakaran sederhana (APAR) di pemukiman padat penduduk, yang menghambat efektivitas kolaborasi dalam penanggulangan bencana kebakaran.

#### **3. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat**

Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam kolaborasi penanggulangan bencana kebakaran di Kota Magelang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Narto, seorang relawan penanggulangan bencana kebakaran, masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Selain itu, minimnya pelatihan dan simulasi kebakaran yang diadakan oleh BPBD dan UPT Damkar juga menjadi hambatan, karena hal ini membatasi pemahaman masyarakat tentang cara mencegah kebakaran. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, mengingat masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait langkah-langkah pencegahan yang seharusnya dilakukan.

#### **4. Hambatan dalam pemadaman di lapangan**

Hambatan utama dalam pemadaman kebakaran di wilayah padat penduduk di Kota

Magelang adalah sulitnya akses ke lokasi kejadian dan keterbatasan sarana dan prasarana. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Winto, petugas pemadam kebakaran, pemukiman yang padat menyebabkan akses jalan menuju lokasi kebakaran sangat sempit, sehingga mobil pemadam tidak dapat menjangkau area tersebut. Selain itu, kepadatan pemukiman mempercepat penyebaran api, meningkatkan potensi kerugian yang lebih besar. Hambatan lainnya terkait dengan kurangnya peralatan pemadam kebakaran yang memadai, yang sebagian besar sudah tergolong usang. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran dan pemeliharaan yang kurang dari pihak Damkar. Kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini, agar proses penanggulangan bencana kebakaran lebih efektif dan dapat mengurangi dampak kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

### **3.3 Upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penanggulangan bencana kebakaran pada wilayah padat penduduk di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah**

Untuk mengatasi kendala dalam kolaborasi penanggulangan bencana kebakaran, pihak-pihak terkait melakukan upaya peningkatan koordinasi, memperbaiki anggaran, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, serta memperbaiki sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi hambatan dan mempercepat respons terhadap bencana kebakaran di wilayah padat penduduk, adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

#### **1. Meningkatkan koordinasi antar pihak yang terlibat kolaborasi**

Untuk meningkatkan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam kolaborasi penanggulangan bencana kebakaran, pihak terkait memanfaatkan teknologi komunikasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Putut Handoko S.STP, Sekretaris BPBD Kota Magelang, yang menjelaskan bahwa karena keterbatasan anggaran untuk rapat koordinasi, pihaknya bersama pihak terkait lainnya menggunakan aplikasi darurat dan grup koordinasi daring. Dengan pemanfaatan teknologi komunikasi ini, kendala yang terkait dengan koordinasi dapat diatasi, memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan efisien, serta memastikan kolaborasi berjalan lebih baik dalam menghadapi bencana kebakaran di wilayah padat penduduk Kota Magelang.

#### **2. Mengalokasikan anggaran yang lebih memadai**

Anggaran merupakan aspek penting yang harus dimiliki dalam menjalankan suatu program. Dalam upaya meningkatkan anggaran dalam penanggulangan bencana kebakaran pemerintah menggandeng sektor swasta dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan membentuk kemitraan dengan perusahaan asuransi untuk menyediakan skema perlindungan kebakaran apabila terjadi. Selain itu, untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai pemerintah dapat memasukkan anggaran kebakaran dalam rencana pembangunan daerah agar memperoleh prioritas pendanaan.

#### **3. Mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat**

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya dan penanggulangan kebakaran, UPT Damkar, BPBD, dan pihak terkait lainnya mengadakan pelatihan dan sosialisasi rutin. Bapak Didik, Kepala UPT Damkar, menjelaskan bahwa mereka melakukan sosialisasi keliling ke sekolah dan pemukiman, didukung media massa untuk menyebarkan informasi. Selain itu, Bapak Putut Handoko, Sekretaris BPBD, menambahkan bahwa sosialisasi juga mencakup cara pelaporan kebakaran melalui call center 112, yang akan menghubungkan masyarakat dengan pemadam kebakaran untuk tindakan cepat. Upaya ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mengurangi risiko kebakaran.

#### **4. Meningkatkan sarana prasarana penunjang untuk mengatasi akses pemadaman yang sulit**

Upaya untuk mengatasi kesulitan akses pemadaman kebakaran di Kota Magelang dilakukan melalui beberapa inisiatif. Pemerintah daerah telah menetapkan aturan terkait lebar jalan dan tinggi gapura untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik. Kepala UPT Damkar, Bapak Didik, menjelaskan bahwa pihak Damkar memasang hydrant di lokasi strategis, seperti mall dan lingkungan perumahan, serta menyediakan alat pemadam api ringan di setiap RT untuk menangani kebakaran skala kecil. Kolaborasi dengan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum juga turut meningkatkan pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan. Selain itu, masyarakat juga diajak berperan aktif dengan menggunakan peralatan sederhana seperti selang air dan ember. Semua upaya ini merupakan hasil kolaborasi yang terus-menerus untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan kebakaran di wilayah padat penduduk.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kota Magelang menunjukkan dampak yang signifikan terhadap efektivitas respons terhadap bencana. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antara BPBD, UPT Damkar, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam mengurangi risiko kebakaran di wilayah padat penduduk. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana. Sejalan dengan penelitian Alyaa Larasati Hasnaa dan Awang Darumurti (2023) menemukan bahwa bentuk *collaborative governance* antara Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation berhasil mengurangi risiko bencana banjir. Sama halnya dengan temuan penelitian ini, di mana kolaborasi antara BPBD dan UPT Damkar di Kota Magelang juga menunjukkan hasil positif dalam penanggulangan bencana kebakaran, terutama dalam hal pencegahan dan respons cepat terhadap kebakaran. Namun berbeda dengan penelitian Rita Wati et al. (2024) menunjukkan bahwa *Collaborative Governance Regime* (CGR) meningkatkan pemahaman masyarakat terkait abrasi. Berbeda dengan temuan ini, penelitian di Kota Magelang menekankan pada pentingnya kolaborasi dalam penanggulangan kebakaran, di mana partisipasi masyarakat masih rendah dan perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan pelatihan.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Temuan ini memperkuat hasil penelitian Raden Imam Al Hafis et al. (2024) yang menekankan perlunya keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam mitigasi bencana. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta di Kota Magelang dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran, sejalan dengan rekomendasi untuk melibatkan lebih banyak aktor dalam proses kolaborasi. Temuan ini menolak hasil penelitian Heru Rochmansjah (2022) yang menyatakan bahwa *collaborative governance* di Kota Bandung belum berjalan efektif. Di Kota Magelang, meskipun ada tantangan, kolaborasi antara BPBD dan UPT Damkar menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penanggulangan kebakaran, dengan adanya dialog tatap muka dan komitmen bersama yang kuat di antara para aktor.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi dan keterbatasan anggaran, yang sejalan dengan temuan Turnip (2021) mengenai tantangan dalam kolaborasi di Provinsi Riau. Penelitian Turnip (2021) mengidentifikasi adanya kendala dalam pemahaman prinsip kolaborasi di Provinsi Riau. Hal ini juga terlihat dalam penelitian ini, di mana kurangnya koordinasi dan keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan *collaborative governance* di Kota Magelang. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dapat membantu mengatasi kendala tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

*Collaborative governance* dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kota Magelang berjalan dengan baik, melibatkan berbagai pihak seperti BPBD, UPT Damkar, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Kolaborasi ini dilakukan melalui koordinasi dan pembagian peran dalam tahapan pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana. Namun, terdapat hambatan seperti kurangnya koordinasi antar pihak, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan peningkatan koordinasi melalui teknologi, menggandeng pihak swasta untuk menambah anggaran, dan melakukan sosialisasi serta pelatihan kebakaran kepada masyarakat. Meskipun efektif, model ini membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan keterlibatan masyarakat agar dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan sumber daya, sehingga tidak dapat mencakup semua aspek kolaborasi. Selain itu, data yang diperoleh bergantung pada wawancara, yang mungkin mempengaruhi objektivitas hasil.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai efektivitas *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana kebakaran dengan melibatkan lebih banyak variabel, seperti teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, penelitian dapat memperluas cakupan dengan membandingkan berbagai daerah di Indonesia untuk memahami perbedaan dalam implementasi kolaborasi. Penelitian juga perlu mengkaji dampak jangka panjang dari kolaborasi ini terhadap ketahanan masyarakat terhadap bencana, serta mengembangkan model kolaborasi yang lebih integratif dan berkelanjutan.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penelitian ini. Terutama kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si, selaku Plt Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, atas arahan dan dukungannya, serta kepada Ibu Dra. Rusmini, M.MPd, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan waktu yang berharga. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, khususnya Ibu Tri Resfeni dan Bapak Bambang, yang selalu memberikan dukungan moral dan doa, serta kepada rekan-rekan yang telah memberikan semangat dan motivasi selama proses penelitian. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. (2017). Kolaborasi antara aparat birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1).
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses collaborative governance untuk mengurangi dampak abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521–529.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arifina, A. S., Pembayun, J. G., & Amanda, M. (2021). Understanding disaster prevention

- literacy of villagers in Magelang Regency. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 7(1), 59–78.
- Damayanti, A. A., & Nunung, R. (2024). Kolaborasi BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah (Doctoral dissertation, IPDN).
- Hasna, A. L., & Darumurti, A. (2023). Collaborative governance dalam mitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 25–37.
- Izzah, U., & Bakri, M. S. (2024). Collaborative governance dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa (Doctoral dissertation, IPDN).
- Jovi, J. P., & Tjahjo, S. (2024). Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Doctoral dissertation, IPDN).
- Martomo, Y. P. (2020). Collaborative governance based post-fire Pasar Klewer management from private sector perspective. In *Seminar International: Collaborative Governance Based Post-Fire Pasar Klewer Management From Private Sector Perspective* (No. 6, pp. 1–6).
- McNaught, R. (2024). The application of collaborative governance in local level climate and disaster resilient development – A global review. *Environmental Science & Policy*, 151, 103627. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.06.013>
- Miller, B. A., Yung, L., Wyborn, C., Essen, M., Gray, B., & Williams, D. R. (2022). Re-envisioning wildland fire governance: Addressing the transboundary, uncertain, and contested aspects of wildfire. *Fire*, 5(2), 49. <https://doi.org/10.3390/fire5020049>
- Nurnawati, E., Sabaruddin, S., & Nurrahman, A. (2024). Analisis collaborative governance pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. *Jurnal Media Birokrasi*, 197–213.
- Putri, D. A. P., & Rohmadin, S. (2024). Collaborative governance dalam penanggulangan bencana banjir di lingkungan Lebak Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi (Doctoral dissertation, IPDN).
- Rochmansjah, H. (2022). Collaborative governance penanggulangan bencana banjir di Kota Bandung (Doctoral dissertation, Perpustakaan Pascasarjana).
- Sartika, I. (2024). Collaborative governance dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 209–233.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian manajemen*. Alfabeta.
- Turnip, H. A. (2021). Collaborative governance menangani masalah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Wati, R., Heriyanto, M., & Sutikno, S. (2024, March). Dinamika kolaborasi: Peran collaborative governance regime (CGR) dalam mitigasi abrasi di pesisir Kabupaten Bengkalis. In *Prosiding Seminar Nasional PSSH (Pendidikan, Saintek, Sosial dan Hukum)* (Vol. 3, No. 1, pp. 189-1).
- Wismaningtyas, T. A., & Savi'ah, R. N. (2022, December). Analysis of performance management at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Magelang Regency. In *3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)* (pp. 988–993). Atlantis Press.
- Wu, J., & Lyu, S. (2024). Public participation in wildfire rescue and management: A case study from Chongqing, China. *Fire*, 7(9), 300.
- Yahya, A. S., Kusmana, D., Ismunarta, I., & Sururama, R. (2024). Collaborative governance dalam penanganan kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Media Birokrasi*, 54–84.
- Yudhatama, V. C., & Putri, N. A. (2024). Collaborative governance dalam pencegahan

kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah  
(Doctoral dissertation, IPDN).

